

Beragama dalam Politik

written by Harakatuna

Menjadi seorang Muslim merupakan kebanggaan tersendiri dalam konteks Indonesia. Pasalnya Islam datang sebagai agama terakhir namun sampai saat ini menjadi agama mayoritas bahkan dalam sejarah Islam dunia, pengikut Islam terbanyak pun ada di Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi acuan bagi negara Islam lain, bahwa Indonesia dengan segala dinamikanya seharusnya menjadi contoh dalam menjalani ajaran agama (Islam).

Sebagai mayoritas, sudah tentu kalangan Islam menempati keadaan dan posisi yang superior hampir dalam segala hal. Tidak terlepas dalam persoalan tata kelola negara. Sebab Islam sebagai agama sesungguhnya telah sempurna dalam mengatur segala hal yang berurusan dengan manusia, kini tinggal manusia itu sendiri menggali nilai-nilai luhur Islam yang terkandung dalam al-Quran maupun Sunnah.

Sebagai contoh nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh agama Islam (bahkan agama lainnya) antara lain keadilan (*al-adat, justice*), kejujuran (*al-amanat-truths*), kemerdekaan (*al-hurriyat, freeddom*), kesetaraan (*al-musawat, equality*), toleransi (*al-tasamuh, tolerance*), melakukan kerja sama dalam kebaikan (*al-ta'awun 'ala al-birr, cooperation*) dan lain sebagainya.

Dengan memperjuangkan nilai-nilai tersebut, berarti sama halnya dengan melakukan perlawanan terhadap nilai-nilai sebaliknya berupa kezaliman, kebohongan, penindasan, permusuhan dan masih banyak variabel lainnya. Itu mengindikasikan bahwa perjalanan kehidupan manusia harus selalu berdasarkan sendi-sendi agama seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Buku ini merekam jejak sejauh mana agama memainkan peran dalam politik di Indonesia. Karena dalam tataran praktis, sistem politik di Indonesia bahkan sampai saat ini masih buruk. Itu salah satu akibatnya muncul dari kalangan elit politik sendiri yang tidak mampu membedakan mana keadilan sosial, mana kepentingan individu. Akibatnya, politik belum menunjukkan dampak yang baik bagi seluruh masyarakat, terutama *wong cilik*.

Dalam ranah politik seperti saat ini, yang menjadi fokus elite politik bukanlah kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Yang terjadi malah sebaliknya; politik

tak lebih dari sekedar untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan demi sebuah kehormatan, kekayaan, dan sejenisnya. Dalam kondisi seperti ini pula, setiap kali ada pesta demokrasi, yang ditonjolkan dan diunggulkan adalah kemenangan masing-masing kelompok. Jelas! Fatsoen politik belum terbentuk dalam hal ini.

Politik Panjat Pinang dijadikan judul dengan alasan yang sangat menarik. Komaruddin Hidayat menganggap bahwa kultur politik Indonesia bisa dilihat setiap kali Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Dalam peringatan itu sudah pasti ada lomba panjat pinang, dan di sana tak ada pemenang sejati, sebab konsep kemenangan hanya akibat dari kejatuhan yang lain dan itu pun dengan cara menginjak sesama teman sendiri (hlm. 3). Demikianlah realitas yang terjadi dari dulu.

Politik Panjat Pinang, kini benar-benar terjadi di depan mata telanjang segenap masyarakat Indonesia. Saling serang, mengutakan ego sektoral dan masih banyak lainnya adalah sekian buktinya. Tak ayal jika sementara pengamat dan pakar menilai bahwa ciri khas Indonesia yang terkenal sebagai bangsa religius semakin terkikis, jika tak ingin dikatakan hilang.

Faktor yang menyebabkan kebobrokan sistem politik sampai saat ini masih seputar elit politik yang salah menggunakan posisinya dalam pemerintahan. Dari segi keilmuan, para elit kita tidak diragukan lagi karena hampir semua jajarannya mengenyam pendidikan ke jenjang akhir sistem pendidikan yang ada. Tetapi persoalannya kemudian, tampak ilmu yang diperoleh tidak digunakan sebagaimana layaknya. Akibatnya politik masih dicap sebagai wadah kotor manusia di muka bumi.

Pandangan bahwa politik adalah wadah kotor sebenarnya kurang tepat, karena politik adalah sesuatu yang baik; memperjuangkan aspirasi rakyat, menata negara dan menelurkan kebijakan. Namun, semua menjadi buruk karena aktor politik. Iya. Rasanya masyarakat Indonesia sudah muak dengan berita korupsi yang melilit elit politik, tak pandang elit politik yang berafiliasi dengan partai agamis maupun nasionalis. Semua seolah sama.

Indonesia mengakui adanya enam agama untuk hidup dan bertahan di dalamnya. Dan semua agama sepakat bahwa keadilan, kemerdekaan, kesetaraan itu harus diperjuangkan dan dilaksanakan. Demikian juga dengan penindasan,

ketidakadilan, dan bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai kemanusiaan harus diberantas. Tetapi kenyataannya, enam agama yang ada seakan kurang mampu menyikapi itu semua.

Dalam konteks itu sebenarnya agama sudah selesai dalam memberikan ajaran dan nilai yang dikandungnya. Karenanya, pesan Komaruddin Hidayat, adalah manusia yang merupakan aktor dengan bekal kebebasannya untuk merespon tawaran agama. Sebab yang beragama adalah manusia, dan objek yang hendak dilayani oleh pesan moral keagamaan sesungguhnya juga manusia (hlm. 172).

Maka, buku “lawas” ini terasa sangat relevan dengan kondisi belakangan ini, terutama pra dan pasca Pemilu serentak 2019. Dengan dengan, dengan membaca buku ini sesungguhnya akan menjadi pijakan awal tentang kemanusiaan kita dalam beragama, tentang kemanusiaan kita dalam berpolitik dan tentang kemanusiaan kita dalam menjalankan nilai agama pada ranah politik. Dengan sajian sejarah dan analogi yang sederhana, Komaruddin Hidayat mampu memberikan nilai dalam buku ini untuk terus dibaca ulang karena sejarah memang selesai, tafsirnya tidak akan usai. Selamat membaca!

Judul: Politik Panjat Pinang: Di Mana Peran Agama?

Penulis: Komaruddin Hidayat

Penerbit: Kompas

Tahun Terbit: 2006

Tebal: xxi+228 halaman

ISBN: 979-709-268-2

Peresensi: Mohammad Haris, mahasiswa jurusan Aqidah Filsafat Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.